



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN **2020**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2020. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur IT, sumber daya manusia IT, Single Data System (SDS) Jawa Tengah, terwujudnya smart province Jawa Tengah sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 96);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 63).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Perubahan Tahun 2020.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik Perubahan Tahun 2020 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun Anggaran 2020 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah mengacu sistematika sebagaimana pedoman dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu:

BAB I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Prov. Jateng.
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Diskominfo Prov. Jateng.

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Prov. Jateng.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Prov. Jateng.

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI DISKOMINFO PROV. JATENG TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2019 dan Capaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng.

Gambaran kinerja Diskominfo Tahun 2019 diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan *e-Controlling* hingga triwulan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 hingga triwulan IV.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo Prov. Jateng 2019 dan
Pencapaian Renstra Diskominfo Prov. Jateng s/d Tahun 2020.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1.	<i>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i>	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85 %	-	-	57 %	60 %	105	64 %	-	67
1.1	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarakan	240 Konten	-	-	24 Konten	24 Konten	100	50 Konten	-	10
1.2	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan	85 Kelompok	-	-	55 Kelompok	55 Kelompok	100	27 Kelompok	-	65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum	220 Buah	-	-	44 Buah	44 buah	100	88 buah	-	20
2	<i>Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	80 %	-	-	20 %	20 %	100	40 %	-	25
2.1	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data center	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik provinsi Jawa Tengah	86 Lokasi	-	-	41 Lokasi	41 Lokasi	100	41 Lokasi	-	48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Kegiatan pengelolaan internet dan intranet	Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	2.000 MBps	-	-	1.200 MBps	1.500 MBps	125	1.400 MBps	-	75
2.3	Kegiatan pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK	41 OPD	-	-	14 OPD	14 OPD	100	21 OPD	-	34
3	<i>Program Pengembangan E-Government</i>	Persentase Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	85 %	-	-	45%	1 kegiatan	100	55%	-	53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan /dikelola	15 Unit	-	-	9 Unit	9 Unit	100	10 Unit	-	60
3.2	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola E-Government	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit	6 Buah	-	-	2 Buah	2 Buah	100	3 Buah	-	33
3.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	Jumlah penyelenggara E-Government yang	1.100 Orang	-	-	650 Orang	680 Orang	105	800 Orang	-	62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ditingkatkan kapasitasnya									
URUSAN STATISTIK											
1.	<i>Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi</i>	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	100%	-	-	74%	141%	191%	79%	-	191
		Persentase Badan Publik Yang Terbuka	100%	-	-	68%	68%	100	76%	-	68
1.1	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah Data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam single data system	9.000 Jenis	-	-	6.500 Jenis	9.173 jenis	141	7.000 Jenis	-	102
1.2	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, politik, hukum dan HAM	Jumlah Data sektor sosial, politik, hukum dan HAM	10.000 jenis	-	-	7.500 jenis	9.958 jenis	133	8.000 jenis	-	99,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang tersedia dalam single data system									
1.3	Kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik	Jumlah daftar informasi publik (DIP) yang di publikasikan badan publik	80 kelompok	-	-	60 kelompok	60 kelompok	100	65 kelompok	-	75
1.4	Kegiatan peningkatan keterbukaan informasi publik	Persentase penyelesaian sengketa informasi	85%	-	-	81%	81%	100	75%	-	95
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PERSANDIAN											
1	<i>Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah</i>	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi lebih dari 80%	83,33%	-	-	16,67%	16,67%	100	33,33%	-	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Kegiatan Tata Kelola Persandian	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya	201 orang	-	-	201 orang	285 orang	142	119 orang	-	142
1.2	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi	Jumlah aplikasi yang di assessment keamanan informasinya	247 Unit	-	-	50 unit	50 unit	100	100 unit	-	20
1.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi intra Pemerintah	Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi	39.317 buah	-	-	9.854 buah	21.406 buah	217	15.594 buah	-	54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NON URUSAN											
1	<i>Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	-	-	100%	100%	100	100%	-	100
1.1	Kegiatan administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan PD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
1.2	Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	Terlayannya jasa surat menyurat	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Tersediannya jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.4	Kegiatan jaminan barang milik daerah	Tersediannya jaminan terhadap barang-barang milik daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	Teselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non PNS dan kebersihan kantor	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.7	Kegiatan pelayanan penyediaan makan dan minum perangkat daerah	Tersediannya makan dan minum rapat yang memadai	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan/ buku perpustakaan perangkat daerah	Tersediannya bahan bacaan/ buku perpustakaan perangkat daerah	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.9	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/ rumah dinas/ gedung kantor/	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerint-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kendaraan dinas/ operasional perangkat daerah										
1.10	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.11	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor	Tersediannya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi. Alat studio, computer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
1.12	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang memadai	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100	-	-	-
1.13	Kegiatan penyediaan perlengkapan	Perlengkapan pendukung	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerin-tahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pendukung perkantoran	perkantoran yang memadai									
2	<i>Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai	100%	-	-	100%	100%	100	100%	-	100
2.1	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan diskominfo prov jateng yang tersusun	8 Dokumen	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	-	100
2.2	Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja diskominfo prov jateng yang tersusun	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	-	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.

Pada tahun 2019 capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Prov. Jateng.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	% CAPAIAN TAHUN 2019	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2023
			2019	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi Jawa Tengah.	a. Indeks domain kebijakan internal SPBE.	2,82	3,41	120,92%	103,33%
		b. Indeks domain Tata Kelola SPBE.	2,40	3,71	154,58%	131,56%
		c. Indeks domain Layanan SPBE	3,06	4,06	132,68%	112,78%
Rata-Rata Capaian					136,06 %	115,89 %
2.	Termanfaatkan data dan informasi statistik sektoral.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	15,18%	60%	385,11%	79,05%
3.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	1 (total nilai 310)	2,9 (total nilai 454)	290%	96,67%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Prov. Jateng.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergi Tingkat Kinerja Pelayanan Diskominfo.

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah merupakan SKPD Provinsi Jawa Tengah yang baru terbentuk setelah dikeluarkannya Pergub Jateng Nomor 70 Tahun 2016, Pergub Jateng Nomor 96 Tahun 2016 dan Pergub Jateng Nomor 63 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut Diskominfo Provinsi Jawa Tengah melanjutkan program/kegiatan yang sudah terbentuk pada dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, serta mulai tahun 2019 sudah mulai melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan dokumen Tahun 2018-2023.

Keselarasan program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 belum ada yang dapat berjalan dengan optimal dikarenakan kewenangan dan program/kegiatan yang menjadi prioritas antara pusat dan daerah belum sinergis.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Diskominfo Prov. Jateng, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
7. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar internasional;
9. Perlunya peralatan pendukung utama dan wajib persandian sesuai rekomendasi standar keamanan informasi;
10. Perlunya peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung yang masih kurang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Prov. Jateng dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;

2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional.

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggungjawab Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian Nasional/Internasional. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum menjadi prioritas pembangunan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan:

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat Jawa Tengah;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System;
- f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

2. Peluang:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berbasis elektronik
- e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

2.3.5. Isu-Isu Penting

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil pencermatan internal tidak ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2020. Tetapi masih ada pergeseran anggaran antar program dan kegiatan yang perlu dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian wewenang tupoksi pada bidang.

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Prov. Jateng Tahun 2020.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.				15.314.000						16.164.000	
1.1	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	78 Konten	13.150.000	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	78 Konten	14.000.000		
1.2	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	62 Kelompok	1.132.107	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	62 Kelompok	1.132.107		
1.3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik.	Jawa Tengah	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	88 Buah	1.031.893	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik.	Jawa Tengah	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	88 Buah	1.031.893		
2.	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.				18.400.000						20.500.000	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center.	Jawa Tengah	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	56 Lokasi	10.479.500	Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center.	Jawa Tengah	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	56 Lokasi	12.579.500		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet.	Jawa Tengah	Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia.	1.400 MBps	7.175.000	Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet.	Jawa Tengah	Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia.	1.400 MBps	7.175.000	
2.3	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK (co-Location/ Hosting)	21 OPD	745.500	Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK (co-Location/ Hosting)	21 OPD	745.500	
3.	Program Pengembangan eGovernment.				6.069.574					6.019.574	
3.1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola.	11 Unit	3.186.442	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola.	11 Unit	3.436.442	
3.2	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	3 Dok	2.216.709	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	3 Dok	2.066.709	
3.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	1.000 Orang	666.423	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara eGovernment.	Jawa Tengah	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	1.000 Orang	516.423	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN STATISTIK												
4.	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi.				3.423.550						3.923.550	
4.1	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam Single Data Sistem.	7.000 Jenis	353.144	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam Single Data Sistem.	7.000 Jenis	528.144		
4.2	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data Sistem.	8.000 Jenis	505.665	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Jawa Tengah	Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data Sistem.	8.000 Jenis	680.665		
4.3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah daftar informasi publik yang dipublikasikanBadan Publik.	65 Kelompok	366.058	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Jumlah daftar informasi publik yang dipublikasikanBadan Publik.	65 Kelompok	466.058		
4.4	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Persentase penyelesaian sengketa informasi.	82%	2.198.683	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	Jawa Tengah	Persentase penyelesaian sengketa informasi.	82%	2.248.683		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN PERSANDIAN												
5.	Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah.				3.509.775						4.509.775	
5.1	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi yang di- assesment keamanan informasinya.	100 Unit	1.600.680	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi.	Jawa Tengah	Jumlah aplikasi yang di- assesment keamanan informasinya.	100 Unit	1.390.909		
5.2	Kegiatan Tata Kelola Persandian.	Jawa Tengah	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya.	201 Orang	865.909	Kegiatan Tata Kelola Persandian.	Jawa Tengah	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pengelola persandian daerah.	201 Orang	1.825.680		
5.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.	Jawa Tengah	Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi.	15.594 Buah	1.043.186	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.	Jawa Tengah	Jumlah pengelolaan komunikasi intra pemerintah.	15.594 Buah	1.293.186		
EKS BAU												
6.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.				8.746.594						9.096.834	
6.1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlaksananya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	455.000	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlaksananya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	855.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlayannya jasa surat menyurat.	12 Bulan	27.360	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terlayannya jasa surat menyurat.	12 Bulan	27.360	
6.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik.	12 Bulan	2.160.004	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik.	12 Bulan	2.210.004	
6.4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah.	12 Bulan	142.500	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.	Jawa Tengah	Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah.	12 Bulan	142.500	
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	1.861.414	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	1.761.414	
6.6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	684.000	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	684.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	114.000	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	114.000	
6.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	22.800	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	22.800	
6.9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif.	12 Bulan	1.727.264	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif.	12 Bulan	1.827.504	
6.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Srana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.	12 Bulan	256.500	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Srana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.	12 Bulan	256.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.000)	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBU-TUHAN DANA (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.	Jawa Tengah	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya.	12 Bulan	633.982	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.	Jawa Tengah	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya.	12 Bulan	533.982	
6.12	Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal	Jawa Tengah	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	171.000	Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal	Jawa Tengah	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	171.000	
6.13	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.	Jawa Tengah	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai.	12 Bulan	490.770	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran.	Jawa Tengah	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai.	12 Bulan	490.770	
7.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				933.320					1.183.320	
7.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	698.320	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	898.320	
7.2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	235.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jawa Tengah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	285.000	
	J U M L A H (RANCANGAN AWAL RKPD 2020)				56.396.813	J U M L A H (ANALISIS KEBUTUHAN DISKOMINFO)				61.397.053	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Jawa Tengah yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO PROV. JATENG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai

leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.1.2. Renstra BSSN RI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa ”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.” Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan.

Visi-Misi Presiden RI 2019-2024, selanjutnya diterjemahkan dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan ‘NAWA CITA’, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Peran BSSN RI dalam rangka dukungan pada Prioritas ke -1, prioritas ke-8 dan prioritas ke-9

TUGAS DAN FUNGSI BSSN

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanansiber.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insidendan/atau serangan siber;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Visi dan MISI BSSN

Visi menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

1. Menjamin keamanan informasi di sector pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi
5. membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
6. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Potensi BSSN

Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekuatan Negara menghadapi ancaman siber di Indonesia. Pembentukan BSSN berpotensi memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh stakeholder di bidang siber, serta menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luar negeri.

Keberadaan BSSN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Indonesia dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia (cyber crime), TNI/Kementerian Pertahanan (cyber defense), Kementerian Luar Negeri (cyber

diplomacy) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan lembaga-lembaga lainnya

Potensi BSSN dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi sangat besar, mengingat BSSN dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber di negara-negara maju lainnya. BSSN juga dapat melakukan benchmark to best practice pada lembaga lembaga keamanan siber di Negara lain yang lebih maju.

Pembentukan BSSN meningkatkan potensi pengembangan SDM yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks SDM siber, BSSN berpotensi membangun SDM siber yang professional dan adaptif terhadap teknologi (technology adaptive) baik untuk kebutuhan internal maupun nasional. Keberadaan BSSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM siber yang menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Adapun dalam konteks kinerja, BSSN berpotensi membangun system manajemen kinerja yang member peluang dan penghargaan kepada inovasi-inovasi baru di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme SDM dalam bidang keamanan siber dengan menginisiasi pemberian penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk tingkat individu.

Pembentukan dan penguatan BSSN juga menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan agar BSSN dapat berperan secara maksimal, diantaranya dalam penyusunan Undang-Undang yang membantu penguatan kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat bagi program-program pengamanan siber dan sandi di Indonesia

Tantangan BSSN RI

BSSN memiliki tantangan besar agar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. BSSN berada di garis terdepan dalam mengembangkan kapabilitas unggul SDM siber dan sandi sehingga deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritical nasional (critical infrastructure), dan ekonomi digital (e-commerce).

BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada publik/masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu (hoax) melalui literasi-literasi terkait, serta menjadi juru bicara representatif dalam menghadapi beberapa kejadian nasional di bidang keamanan siber dan menjadi wakil Indonesia di forum-forum siber internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan BSSN.

Selain melaksanakan tupoksi di bidang keamanan siber, BSSN juga tetap mengemban tupoksi di bidang penyelenggaraan persandian untuk pemerintah atau negara. Dalam konteks revitalisasi persandian, maka BSSN memiliki tantangan untuk tetap melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat,

maupun di daerah, melaksanakan kegiatan terkait analisis sinyal, modernisasi dan sertifikasi peralatan sandi, mengembangkan peralatan sandi karya mandiri, melaksanakan audit persandian secara sistematis dan terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kriptografi serta terus melakukan pengembangan standar kriptografi nasional

Permasalahan BSSN RI

Berbagai permasalahan yang ada sehingga di butuhkan peran aktif dari BSSN RI adalah:

- 1) Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
- 2) Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
- 3) BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
- 4) Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
- 5) Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait.

Tujuan Renstra BSSN RI

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan b udaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranyakerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

3.1.3. Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Dokumen renstra Badan Pusat Statistik tidak dapat menjadikan acuan bagi dokumen Renstra Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat pada lampiran UU 23/2014 yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, pada huruf T pembagian urusan pemerintahan bidang statistik pemerintah pusat adalah penyelenggaraan statistik dasar sedangkan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah provinsi, sehingga antara pusat dan daerah untuk urusan pemerintahan bidang statistik tidak ada hubungan kerja secara langsung karena lingkup kerjanya yang berbeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Prov. Jateng.

Tujuan kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh Diskominfo dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan selama Tahun 2018-2023 adalah Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah dengan 3 (tiga) sasaran utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 3) Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Jawa Tengah.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2018-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2020.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	2,88
		1) Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	Angka	2,94
			Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	Angka	2,51
			Indeks Domain Layanan SPBE.	Angka	3,20
		2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral.	Persen	30,36

		3) Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Jawa Tengah.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	1
--	--	---	--	-------	---

Sumber: Renstra Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2018-2023.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO PROV. JATENG

Rumusan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo Prov. Jateng Perubahan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA	
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET			Rp. (.000)
						URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	URUSAN KOMINFO											51.962.481		43.523.315			
1.1	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	26.642.388	60 %	18.866.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK	
1.1.1	Kegiatan pengelolaan jaringan dan data center.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.	41 Lokasi	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	19.278.181	56 Lokasi	12.548.102		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Infrastruktur dan Teknologi	
1.1.2	Kegiatan pengelolaan internet dan intranet.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	Jumlah Kapasitas Bandwidth yang tersedia.	1.400 MBps	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	7.075.038	3.000 MBps	5.992.866		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Internet dan Intranet	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	Rp. (.000)			TARGET	Rp. (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.1.3	Kegiatan pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	Jumlah SKPD Yang Terintegrasi Infra-struktur TIK.	21 OPD	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	40 %	289.169	28 OPD	325.032		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang TIK Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi
1.2	Program Pengembangan eGovernment.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	9.045.012	65 %	5.893.315		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov
1.2.1	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan aplikasi.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola.	10 Unit	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	6.928.886	13 Unit	2.904.057		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Pengembangan Aplikasi
1.2.2	Kegiatan peningkatan tata kelola eGovernment.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.	3 Dok	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	1.626.627	4 Dok	2.409.418		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Tata Kelola eGov

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
1.2.3	Kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggara eGovernment.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	Jumlah penyelenggara eGovernment yang ditingkatkan kapasitasnya.	800 Org	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	55 %	489.499	1.100 Org	579.840		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang eGov Seksi Pengembangan Ekosistem eGov
1.3	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	16.275.081	71 %	18.764.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP
1.3.1	Kegiatan peningkatan pengelolaan informasi publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan.	50 Konten	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	13.827.356	132 Konten	16.895.009		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik
1.3.2	Kegiatan pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan.	27 Kelompok	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	276.944	62 Kelompok	1.247.165		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	Rp. (.000)			TARGET	Rp. (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3.3	Kegiatan analisis berita dan pendapat publik.	-	-	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2,94 2,51 3,20	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum.	88 Buah	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	64 %	2.170.781	132 Buah	621.826		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang IKP Seksi Opini Publik
2	URUSAN STATISTIK											1.991.277		4.173.550		
2.1	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	1.991.277	89 %	4.173.550		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik
						Persentase Badan Publik yang terbuka.	76 %	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %		84%			Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik
2.1.1	Kegiatan penyusunan data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System.	7.000 Jenis	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	110.655	8.000 Jenis	507.040		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
2.1.2	Kegiatan penyusunan data statistik sektor sosial, politik, hukum dan HAM.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	Jumlah data sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tersedia dalam Single Data System.	8.000 Jenis	Persentase ketersediaan data sektoral.	79 %	151.426	9.000 Jenis	677.833		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM
2.1.3	Kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	Persentase Badan Publik yang terbuka.	76 %	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik.	65 Kelompok	Persentase Badan Publik yang terbuka.	76 %	181.243	70 Kelompok	470.602		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
2.1.4	Kegiatan peningkatan keterbukaan informasi publik.	-	-	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	30,36 %	Persentase Badan Publik yang terbuka.	76 %	Persentase penyelesaian sengketa informasi.	75 %	Persentase Badan Publik yang terbuka.	76 %	1.547.953	83 %	2.518.075		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Statistik Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	URUSAN PERSANDIAN											1.804.777		8.831.904		
3.1	Program Peningkatan Pemanfaatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	1.804.777	50,00 %	8.831.904		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI
3.1.1	Kegiatan tata kelola persandian.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya.	119 Org	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	299.178	201 Org	3.656.290		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Tata Kelola Persandian
3.1.2	Kegiatan pengamanan persandian dan informasi.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	Jumlah aplikasi yang di-assessment Keamanan Informasinya.	100 Unit	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	691.971	149 Unit	2.785.750		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
3.1.3	Kegiatan pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah.	-	-	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah.	1	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	Jumlah informasi yang menggunakan jaringan komunikasi sandi.	15.594 Buah	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	33,33 %	813.628	21.442 Buah	2.389.864		Dinas Kominfo Prov. Jateng Bidang Persandian dan KI Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
4	EKS BAU											7.636.155		10.677.417		
4.1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	7.216.772	100 %	9.328.432		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat
4.1.1	Kegiatan administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlaksananya manajemen keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	1 Dok	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	455.000	1 Dok	974.700		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
4.1.2	Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terlayani-nya jasa surat menyurat.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	18.850	12 Bulan	31.191		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.3	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedia-nya jasa komuni-kasi, air, listrik.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	559.004	12 Bulan	2.519.404		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.4	Kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedia-nya jaminan terhadap barang-barang milik daerah.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	142.500	12 Bulan	162.450		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
4.1.5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	1.994.610	12 Bulan	2.008.011		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.6	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	367.195	12 Bulan	779.760		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Keuangan
4.1.7	Kegiatan pelayanan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah makan dan minum yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	113.360	12 Bulan	228.000		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
4.1.8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah bahan bacaan yang tersedia.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	12.800	12 Bulan	25.992		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.9	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Gedung dan kendaraan dinas yang representatif.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	1.854.837	12 Bulan	1.057.354		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.10	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	231.500	12 Bulan	292.410		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
4.1.11	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	961.341	12 Bulan	494.739		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg
4.1.12	Kegiatan pendidikan pelatihan formal	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Jumlah SDM yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	71.826	12 Bulan	194.944		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program
4.1.13	Kegiatan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	52,50 %	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	Perlengkapan pendukung perkantoran yang memadai.	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.	100 %	433.949	12 Bulan	559.477		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Umpeg

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	(13)			(14)	(15)
4.2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	58	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	-	-	Meningkat- nya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	58	419.383	100 %	1.348.985		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat
4.2.1	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	58	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	Jumlah dokumen perencana- an Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	7 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	366.263	7 Dok	1.024.085		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN DAE- RAH	PRIORITAS PEMBA- NGUN- AN NA- SIONAL	TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF PERUBAH AN TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/UNIT KERJA
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL			Rp. (.000)	TARGET		
				URAIAN	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	Rp. (.000)			TARGET	Rp. (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.2.2	Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	58	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun.	5 Dok	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	100 %	53.120	5 Dok	324.900		Dinas Kominfo Prov. Jateng Sekretariat Subbag Program
TOTAL BELANJA LANGSUNG												63.394.690		67.206.186		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2020, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan Tahun 2020 dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian serta statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.